

BAB I

PENDAHULUAN

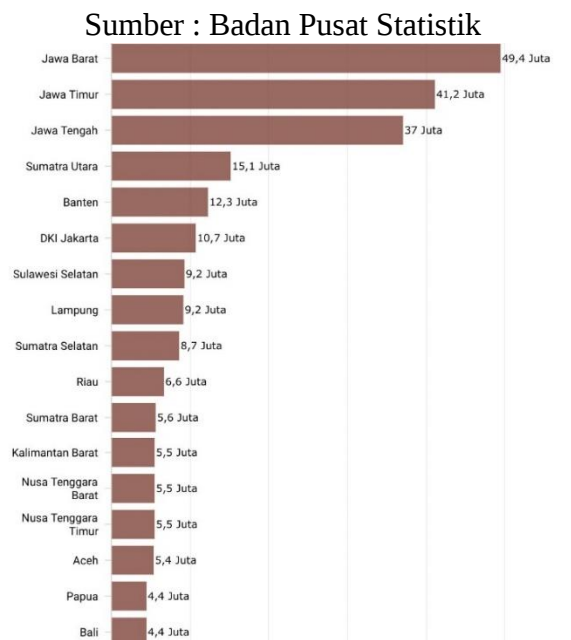
1.1 Latar Belakang

Sampah adalah persoalan umum yang sering terjadi di Indonesia. Penumpukan sampah yang terlalu banyak bisa menyebabkan permasalahan yang cukup serius bilamana tidak ditutaskan dengan tepat. Dampak dari penumpukan sampah yang tidak diurus dengan tepat mampu mendatangkan berbagai masalah tidak pada lingkungan saja melainkan manusia pun bisa ikut merasakan dampaknya seperti munculnya berbagai penyakit dari bakteri atau virus yang disebabkan oleh sampah, menyebabkan terjadinya banjir, kerusakan ekologis, dan tentunya menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan sampah yang terjadi disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang belum paham sepenuhnya terkait pentingnya menjaga lingkungan.

Kegiatan manusia dengan segala aktivitasnya sehari-hari dapat mencemari lingkungan baik pada skala kecil ataupun besar. Hasil dari produksi sampah dalam kegiatan sehari-hari merupakan faktor penyebab pencemaran lingkungan. Sampah yakni bahan sisa yang tidak diperlukan lagi setelah sebuah proses selesai (Teti Suryati 2014: 3). Meningkatnya pertumbuhan penduduk juga menyebabkan peningkatan produksi sampah. Atas dasar itu, diperlukan sebuah sistem penerapan pengelolaan sampah yang efektif serta tidak membawa dampak negatif pada kesehatan masyarakat (Levi Anatolia, 2015: 116).

Negara Indonesia ialah satu dari sekian negara dengan penghasilan sampah tahunan dengan jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan pada data sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN), jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2022 adalah 19,4 juta ton hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Pemerintah melewati UU No.18 Tahun 2008 terkait Pengelolaan Sampah menekankan bahwasanya peningkatan angka penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat memunculkan pertambahan jenis, volume, juga karakteristik sampah yang kian bervariasi. Menurut sumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS jumlah penduduk di Indonesia di tahun 2022 sejumlah 275.773,5 Juta jiwa. Berikut adalah data persebaran jumlah penduduk di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2022 :

Gambar 1. 1Jumlah Penduduk di Provinsi Indonesia Tahun 2022



Dari gambar 1.1 mampu disimpulkan bahwasanya Provinsi Banten ialah salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak yakni sebesar 12,3 juta. Provinsi

Banten tersusun atas beberapa Kabupaten atau Kota yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1.1 Timbulan Sampah Kota Tangerang Selatan

Tahun	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2019	Tangerang Selatan	972,63	355.009,43
2020	Tangerang Selatan	799,07	291.659,27
2021	Tangerang Selatan	1.070,56	390.753,87
2022	Tangerang Selatan	1.031,26	376,411.56
Total		3,873.52	1,413,834.12

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2023

Dari data diatas, pada tahun 2019 – 2022 Kota Tangerang Selatan mengalami naik turun pada jumlah volume sampah yang dihasilkan. Pada tahun 2019 timbulan sampah yang dihasilkan dalam tahunan yakni 355.009,43. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan total 291.659,27. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan yakni 390.753,87. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yakni dengan total 376,411.56.

Mengelola sampah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan layanan publik. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan peralatan untuk mengelola sampah. Pada implikasinya, pemerintah mampu melibatkan pihak ketiga dan juga keterlibatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik diharapkan mampu mengurangi persoalan – persoalan yang

didatangkan oleh tumpukan sampah pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menggunakan sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat.

Sampah ialah hasil sisa dari berbagai kegiatan manusia. Tempat-tempat seperti pasar, pemukiman warga, kawasan bisnis, perkantoran, area publik seperti jalan dan taman, bahkan industri turut menghasilkan sampah. Penanganan sampah membutuhkan sistem yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sumber-sumber penghasil sampah beragam, mulai dari perumahan, pusat perbelanjaan, kantor, proyek pembangunan, fasilitas perkotaan, pabrik pengolahan, kawasan industri, hingga lahan pertanian. Peningkatan jumlah sampah diakibatkan oleh tiga faktor utama, yakni pola konsumsi masyarakat yang terus mengalami peningkatan, kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang masih rendah, serta keterbatasan teknologi dan lahan untuk melakukan pendauran ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pada hal ini termasuk pengurangan dan pengelolaan terhadap sampah. Pengelolaan sampah harus dijalankan dengan terarah dan sistematis, serta dikelola dengan baik guna mengurangi dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan.

Mengenai pengelolaan sampah, pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan kebijakan pengelolaan sampah yakni Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 berubahmenjadi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 yang berfungsi sebagai pengatur tentang pengelolaan sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah memiliki kewajiban pada konteks pengelolaan sampah, yang mana Pemerintah Kota Tangerang Selatan melewati

Dinas Lingkungan Hidup wajib mengupayakan terlaksananya pengelolaan sampah yang baik, yang tidak menimbulkan kerugian terhadap warga dan lingkungan sekitar. DPRD Kota Tangerang Selatan telah memberikan persetujuan atas rencana eksekutif untuk mengangkut ratusan metrik ton sampah setiap harinya menuju Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cilowong di wilayah Kota Serang, Banten. Namun, keputusan ini dipandang hanya sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan permasalahan sampah secara mendasar, melainkan sekedar memindahkannya dari satu lokasi ke lokasi lain.

Penanganan masalah sampah di Kota Tangerang Selatan menjadi tanggung jawab Bidang Persampahan di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Keberadaan satuan kerja ini didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 terkait Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Satu dari banyaknya upaya yang dijalankan yakni program pemilahan sampah, yakni memisahkan sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya, menyediakan tempat sampah organik serta anorganik di tiap rumah, pemukiman, area bisnis, kawasan industri, wilayah khusus, fasilitas umum, sarana sosial, juga tempat-tempat lainnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah mempunyai Peraturan Daerah dalam pengelolaan sampah yakni Perda No.13 Tahun 2019 pasal 6 yang berbunyi bahwasanya Tugas Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Mengembangkan serta menumbuhkan kesadaran kultur masyarakat pada pengelolaan sampah
- b. Menjalankan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
- c. Menumbuhkembangkan serta memaksimalkan kesadaran masyarakat ataupun badan usaha guna meminimalkan penggunaan kantong, wadah kemasan plastic

Dalam upaya penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 38 Perda Nomor 13 tahun 2019 bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan swasta/Badan usaha pengelolaan sampah dalam melakukan penanganan sampah.

Upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pemanfaatan sampah yakni dengan menjalankan program Yok Yok Ayok Daur ulang yang berkolaborasi dengan sektor swasta, pemerintah, dan komunitas. Hal ini sesuai dengan pasal 38 Perda Nomor 13 tahun 2019 bahwa pemerintah daerah dapat melakukan Kerjasama dengan sektor swasta.

Upaya pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan masih terfokus pada pembuangan akhir sampah saja. Perihal ini disebabkan belum adanya perencanaan sistem penanganan sampah yang komprehensif dan profesional. Namun, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 terkait Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi

Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada pasal 3, Kota Tangerang Selatan harus mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, meskipun realisasi hal tersebut masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Persoalan tentang sampah di Kota Tangerang Selatan sudah meraih titik yang cukup serius. Situasi kian diperparah dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, sementara lahan pengelolaan semakin terbatas, ditambah dengan kesadaran masyarakat dalam menangani sampah yang masih rendah. Salah satu isu utama adalah keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada 2018, Tangerang Selatan menghasilkan 1000 ton sampah per hari. Angka ini terus meningkat menjadi 1.031 ton per hari pada Februari 2019 dan 1.070 ton per hari di tahun 2020. Peningkatan volume sampah ini membuat TPA Cipeucang, satu-satunya TPA di wilayah tersebut, tidak lagi mampu menampung timbunan sampah. Luas lahan TPA yang terbatas tidak sebanding dengan kuantitas sampah yang harus ditampung. Kondisi ini disebabkan oleh manajemen pengelolaan sampah yang kurang baik dari hulu ke hilir, serta pertambahan penduduk Kota Tangerang Selatan yang turut meningkatkan volume sampah setiap tahunnya.

Gambar 1.2 TPA Cipeucang Overload



Sumber : Siberkota.com

Kebijakan penetapan TPA Cipeucang sebagai Tempat Pembuangan Akhir bertujuan sebagai solusi terhadap isu sampah yang terdapat di Kota Tangerang Selatan karena sebelum TPA Cipeucang diresmikan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengelola sampah pada TPA Rawa Kucing, Kabupaten Tangerang. Sistem Pengelolaan sampah yang digunakan TPA Cipeucang yakni system penampungan terbuka atau *open dumping*, yang mana system *open dumping* merupakan system yang kurang optimal untuk diterapkan jangka panjang karena sampah tersebut akan terus ditumpuk tanpa adanya pengolahan dan penanganan lebih lanjut. Dari system *open dumping* tersebut akan memberikan dampak negatif bagi pemukiman penduduk disekitar TPA Cipeucang. Karena jarak pemukiman penduduk dengan TPA kurang dari 500 meter dan dampak yang ditimbulkan seperti bau tidak sedap seringkali

membuat masyarakat tidak nyaman dan hal tersebut sudah di keluhkan oleh Masyarakat sekitar.

TPA seharusnya menjadi tempat pemrosesan paling akhir yang mana hanya menerima residu dari sampah saja namun, penumpukan sampah yang ada pada TPA Cipeucang belum terkelola dengan baik. Sampah yang masuk pada TPA seharusnya sudah melewati tahap pengelolaan dari TPS, TPS3R ataupun bank sampah. Realitanya, sampah yang dibawa ke TPA Cipeucang masih dalam kondisi utuh dan tercampur. Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum terlihat menerapkan strategi kebijakan yang baik dalam urusan pengelolaan sampah pada TPA Cipeucang hal tersebut mmpu terlihat dari TPA Cipeucang yang masih mengalami *overload* sampah.

Kota Tangerang Selatan terdapat 7 kecamatan antara lain Ciputat Timur, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Serpong, Pamulang, beserta Setu. Setiap kecamatan berkarakteristik yang nyaris sama, yaitu adalah daerah pemukiman. Akan tetapi, ada hal yang menjadi pembeda di antara setiap kecamatan. Kecamatan Ciputat sebagai contoh, mempunyai area perdagangan dan jasa yang relatif luas alhasil karakteristik sampah yang dihasilkan nantinya sedikit berbeda dengan kecamatan yang lain. Kecamatan Ciputat merupakan kecamatan yang memiliki pasar tradisional besar terbanyak diantara kecamatan yang lain. Ciputat memiliki pasar tradisional yang cukup besar seperti Pasar Ciputat, Pasar Cimanggis, dan Pasar Jombang. Pasar Cimanggis ialah salah satu pasar tradisional yang ada di Ciputat yang

cukup ramai pedagang dan pembeli dan menghasilkan banyak sampah akibat dari limbah sayuran, plastik dan lain-lain.

Tabel 1.2 Jumlah Pasar Tradisional di Kecamatan Tangerang Selatan

Kecamatan	Nama Pasar	Jumlah
Serpong	1. Pasar Tumaritis 2. Pasar Serpong	2
Serpong Utara	1. Pasar Segar Graha Raya Bintaro 2. Pasar Jelupang	2
Pondok Aren	1. Pasar Ceger 2. Pasar Arinda	2
Ciputat	1. Pasar Ciputat 2. Pasar Jombang 3. Pasar Cimanggis	3
Ciputat Timur	1. Pasar Pondok Ranji 2. Pasar Gintung	2
Pamulang	1. Pasar Bukit Indah	1
Setu	1. Pasar Jengkol	1

Sumber: Diolah oleh peneliti

Data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Ciputat memiliki 3 pasar tradisional yakni Pasar Jombang, Pasar Ciputat, Pasar Cimanggis sehingga Kecamatan Ciputat merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki pasar tradisional dibandingkan kecamatan yang lainnya. Kecamatan Serpong memiliki 2 pasar tradisional yakni Pasar Tumaritis, dan Pasar Serpong. Kecamatan Serpong utara memiliki 2 pasar tradisional yakni Pasar Segar Graha Raya Bintaro dan Pasar Jelupang. Kecamatan Pondok Aren memiliki 2 pasar tradisional yakni Pasar Ceger dan Pasar Arinda. Kecamatan Ciputat Timur memiliki 2 pasar tradisional yakni Pasar Pondok Ranji dan Pasar Gintung.

Kecamatan Pamulang memiliki 1 pasar tradisional yakni Pasar Bukit Indah.

Kecamatan Setu memiliki 1 pasar tradisional yakni Pasar Jengkol.

Pasar Cimanggis adalah sebuah pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Ciputat. Pasar Cimanggis mempunyai permasalahan seperti menumpuknya sampah hasil pedagang sekitar bahkan tidak jarang orang yang membuang sampah sembarangan di area lokasi pasar cimanggis. Hasil dari penumpukan sampah tersebut diakibatkan juga karena TPS sementara yang sudah berada sejak awal pasar cimanggis in dibuka, hal ini menyebabkan sepanjang pinggir jalan pasar cimanggis menjadi bau yang sangat tidak sedap. Dalam rangka mengatasi masalah bau tak sedap yang disebabkan oleh tumpukan sampah di Pasar Cimanggis, Dinas Kebersihan Kota Tangerang Selatan telah menginstruksikan agar pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir di Cipecang, Serpong dilaksanakan setiap hari. Sampah yang sudah diangkut setiap hari ini, tidak lantas membuat bau tidak sedap itu hilang begitu saja, sumber mengatakan hal itu terjadi karena sampah yang sudah dari lama tertumpuk.

Gambar 1.3 Kondisi TPS Sementara Pasar Cimanggis



Sumber : megapolitan Kompas

Pasar Ciputat adalah pasar tradisional yang berlokasi di Kecamatan Ciputat, pasar ini mempunyai luas bangunan 14.516 M yang mana luas lahannya 5.670 M. Akibat adanya pasar di Ciputat, sampah merupakan permasalahan di jalanan sekitar Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Tiap pagi dan malam, banyak masyarakat sekitar yang membuang kantong-kantong sampah dan diletakan di tengah pembatas Jl.Dewi Sartika serta bawah Flyover Ciputat.

Gambar 1.4 Sampah di tengah Jl. Dewi Sartika dan Flyover dekat Pasar Ciputat



Sumber : detikcom

Sampah-sampah yang diletakkan di tengah jalan itu merupakan sampah-sampah dari permukiman sekitar. Saat pagi hari banyak masyarakat sekitar yang hendak pergi kerja, membuang sampah di area tersebut karena jalan ini merupakan jalanan utama penghubung antara Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. Banyak individu yang memilih untuk membuang sampah di trotoar atau di flyover karena kurangnya fasilitas tempat sampah di sekitar tempat tinggal mereka, seperti di kos-kosan atau rumah kontrakan. Kebiasaan negatif ini dalam membuang sampah di tempat yang tidak semestinya juga dianggap sebagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah lingkungan. Situasi Pasar Ciputat semakin memperhatikan. Di samping tidak tertata baik, kerap juga badan jalan dijadikan tempat usaha yang menyebabkan penumpukan sampah dan kemacetan pada jam tertentu. Sampah-sampah hasil pedagang Pasar Ciputat selalu berserakan dan menumpuk sampai ke badan jalan.

Masalah sampah di pasar tradisional sampai saat ini memang sangat sulit diatasi. Belum jelasnya tata pengolahan sampah dan minimnya kepekaan masyarakat akan indah dan nyamannya lingkungan, juga menjadi faktor utama masalah ini. Pasar Jombang adalah sebuah pasar tradisional yang ada di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Pasar Jombang mempunyai permasalahan pengelolaan sampah yang serupa dengan Pasar Ciputat dan Pasar Cimanggis. Tumpukan sampah Pasar Jombang yang menggunung ini dikeluhkan oleh masyarakat sekitar dan juga pedagang Pasar Jombang. Pedagang mengeluhkan sampah yang menumpuk ini akibat kebersihan yang tidak diperhatikan pemerintah setempat. Pedagang menyampaikan keluhan terhadap kebersihan lingkungan karena petugas kebersihan hanya melakukan pengangkutan sampah dari tempat sampah sekali sehari, sementara sampah yang berserakan di tanah dibiarkan tidak terurus. Pelanggan yang datang untuk berbelanja mengalami rasa kurang nyaman dan harus menutup hidung akibat bau sampah yang menyengat. Banyak pelanggan enggan datang ke pasar bagian depan karena merasa tidak nyaman dengan kondisi sampahnya. Pedagang setempat sangat kecewa akan hal ini, sebab mereka sudah memberikan Rp.2000 untuk kebersihan. Bak sampah yang disediakan dan ditempatkan oleh Dinas Kebersihan seakan tidak dimanfaatkan dengan benar oleh para pedagang pasar, pasalnya, meski bak sampah yang disediakan masih kosong, para pedagang justru membuang sampah berserakan di sekitar bak sampah tersebut. Para pedagang umumnya membuang sampah tidak ke dalam bak karena tingginya

bibir bak dan beratnya sampah yang mesti di buang. Bak sampah ditaruh ditepi jalan untuk memudahkan petugas kebersihan mengangkutnya. Meski petugas kebersihan sering datang namun karena volume sampah yang banyak, sehingga sampah terlihat terus-terusan menumpuk. Menumpuknya sampah itu kerap kali menjadi salah faktor penyebab kemacetan, banyaknya sampah yang menumpuk hampir ketengah jalan membuat arus lalu lintas menjadi sempit. Memang sudah semestinya lembaga terkait dapat menyelesaikan masalah ini, pemindahan lokasi bak sampah pada tempat yang etis dan tidak menyulitkan petugas pengangkut sampah harus segera dilakukan, agar citra pasar tradisional tidak melulu soal kotor, tidak higienis dan semraut.

Gambar 1.5 Tumpukan Sampah di Pasar Jombang



Sumber : TangerangNews

Di wilayah Kecamatan Ciputat, terdapat praktik penanganan sampah yang kurang tepat, yaitu dengan membakar sampah secara terbuka di berbagai titik permukiman. Cara ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar akibat asap yang ditimbulkan, sekaligus mencemari kualitas udara di lingkungan tersebut. Metode pembakaran sampah semacam ini semestinya dihindari dikarenakan mampu membawa dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sampah dapat berdampak pada kesehatan manusia. Orang yang terpapar polutan ini dapat mengalami iritasi mata dan hidung. Tentu cara ini kurang efektif dalam menangani permasalahan penumpukan sampah, walaupun cara ini tergolong cara yang cepat untuk mengurangi sampah tetapi membakar sampah dapat menimbulkan permasalahan lain bagi lingkungan, juga masyarakat sekitar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, menargetkan pengurangan sampah tahun 2021 adalah 24 persen dari timbunan sampah. Timbunan sampah ini mencapai 800 ton per hari, sehingga target pengurangan sekitar 190 ton per hari. Kepala DLH Tangerang Selatan, Toto Sudarto menjelaskan: *"Saat ini kita baru dapat mengurangi sekitar 139 ton per hari. Ada kekurangan sekitar 51 ton per hari. Hal inilah yang harus dikejar agar sampah yang berakhir di TPA Cipeucang tidak semakin banyak."*. (TangerangNews, 2021)

Pada hakikatnya, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola masalah sampah di wilayahnya masing-masing. Kewenangan ini

merupakan bagian dari otonomi daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dasar hukum kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan sampah bersumber dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait Pengelolaan Sampah beserta peraturan pelaksanaannya. Atas dasar ini, amatlah krusial bagi pemerintah daerah agar memahami kewenangannya guna menyusun dan menerapkan regulasi terkait pengelolaan sampah tanpa harus menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pemahaman yang baik tentang pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan persampahan di daerah masing-masing seperti penumpukan sampah di pasar tradisional yang terus menumpuk, penggunaan kantong plastik yang masih banyak digunakan oleh para pedagang, pemanfaatan sampah dan lain sebagainya.

Berdasarkan permasalahan yang sudah disampaikan diatas, mampu diketahui bahwasanya Perda No.13 Tahun 2019 terkait pengelolaan sampah belum sepenuhnya terealisasi. Tugas Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah disebutkan bahwa pemerintah daerah yaitu menubuhkan kesadaran budaya masyarakat pada pengelolaan sampah, menjalankan upaya pengurangan sampah, dan menggugah kesadaran masyarakat ataupun badan usaha pada pengurangan pemakaian kantong kemasan plastik. Pada Kota Tangerang Selatan, khususnya kecamatan Ciputat, hal ini tentu belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan Kecamatan Ciputat memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan Kecamatan Ciputat mempunyai pasar tradisional

yakni Pasar Ciputat, Pasar Cimanggis dan Pasar Jombang. Pasar tradisional tersebut tentu menimbulkan berbagai masalah terkait penumpukan sampah dan juga masih banyaknya pedagang usaha yang menggunakan kantong plastik sebagai wadah untuk proses pembelian ke pelanggan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan masih mengalami permasalahan sampah dikarenakan banyaknya pasar tradisional yang sangat berdampak kepada permasalahan lingkungan.
2. Belum optimalnya sosialisasi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Kota Tangerang Selatan No.13 Tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang sebelumnya, alhasil penulis melakukan perumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung pada pengelolaan sampah di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tiap penelitian yang dijalankan memiliki target atau tujuan yang hendak diraih. Secara umum, penelitian dalam bidang pengetahuan empiris bermaksud

guna mengidentifikasi, mengembangkan, juga membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, penelitian dilakukan guna menemukan, memperluas, dan memvalidasi kebenaran ilmiah dalam suatu bidang kajian tertentu. Berdasarkan rumusan masalah terkait efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, maka dirumuskan 2 tujuan penelitian seperti berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Mengacu pada persoalan yang mana adalah fokus penelitian serta tujuan yang ingin diraih, penelitian ini diekehendaki dapat memberi manfaat seperti berikut:

- a. Dari sisi akademis, temuan dari penelitian ini harapannya mampu berguna bagi peneliti guna meningkatkan kapabilitas menulis karya ilmiah serta memperluas wawasan ilmiah dalam bidang Studi Administrasi Publik, khususnya terkait Implementasi Kebijakan.

- b. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini harapannya mampu menjadi masukan bagi instansi terkait dalam kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan yang mana ialah bagian penting dalam sebuah penelitian. Hal tersebut dijalankan guna memperlihatkan bahwasanya penelitian yang akan dijalankan bukanlah plagiat dari penelitian sebelumnya, melainkan merupakan karya orisinil dengan topik yang memang serupa. Pada bagian ini, akan disajikan beberapa artikel jurnal dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No (1)	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal (2)	Fokus Kajian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Temuan Penelitian (5)
1	Nama Penulis : Lina Nurlina, Didin Muhafidin, Dedi Sukarno Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kab.Bandung (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang) Nama Jurnal : (JANE) Jurnal Administrasi Negara, Volume 13 No.1, Agustus 2021	Bagaimana penerapan kebijakan pengelolaan sampah Kab.Bandung di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang	Kualitatif	Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwasanya penerapan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pelayanan Soreang, Kabupaten Bandung, masih belum berlangsung secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dengan kelompok sasaran yang masih memegang tradisi lama, sehingga sulit untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah yang baik. Kondisi ini menyebabkan belum tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut secara optimal.

No (1)	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal (2)	Fokus Kajian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Temuan Penelitian (5)
2	Nama Penulis : Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kab. Bengkulu Selatan Nama Jurnal : JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, Volume 3 No.2, September 2021	Guna mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah serta mengidentifikasi apa saja faktor penghambat pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kab. Bengkulu Selatan	Kualitatif	Berdasarkan penelitian ini, penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar beserta prosedur yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya sejalan dengan isi kebijakan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa ketidaksesuaian antara hasil pelaksanaan dengan apa yang diharapkan pada kebijakan tersebut.
3	Nama Penulis : M Daeni, Husnul Rizqi Judul : Implementasi Kebijakan	Untuk mengidentifikasi pemberlakuan kebijakan terutama pasal 17 Perda Nomor 6 Tahun 2016 terkait pengelolaan sampah	Kualitatif	Temuan studi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Pasal 17, tetapi belum meraih tingkat optimal. Perihal ini diakibatkan oleh peningkatan produksi sampah

No (1)	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal (2)	Fokus Kajian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Temuan Penelitian (5)
	Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang Nama Jurnal : Jurnal Public Service and Governance, Volume 2 No.1 , 2021			yang terus berlanjut, kurangnya dukungan dari infrastruktur yang makin baik, kualitas Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai, juga partisipasi masyarakat yang rendah.
4	Nama Penulis : M.Farhan Surya Novaldi, Ayuning Budiati, Arenawati Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang Nama Jurnal : Jurnal Desentralisasi dan	bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri, kemudian memahami bagaimana partisipasi masyarakat pada implementasi kebijakan pada pengelolaan sampah serta mengidentifikasi beragam faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri.	Kualitatif	Hasil penelitian pengelolaan sampah di Desa Margagiri belum maksimal. Masih ada kendala dari pemerintah Desa Margagiri. Hambatan dari masyarakat adalah kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah

No (1)	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal (2)	Fokus Kajian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Temuan Penelitian (5)
	Kebijakan Publik (JDKP), Volume 03 No.2, September 2022			
5.	Nama Penulis : Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Judul : Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora Nama Jurnal : Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia	Masalah global yang serius adalah jumlah sampah yang terus meningkat dan berdampak negatif pada kesehatan. Karenanya, dibutuhkan strategi yang efektif dalam mengelola sampah. Penelitian ini bermaksud guna menggambarkan bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan serta menguraikan sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Blora.	Kualitatif	Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora telah berjalan lancar dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 terkait pengelolaan sampah. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan retribusi, identifikasi sumber sampah, pengemasan, penempatan tempat pengumpulan sampah (TPS), pengangkutan, hingga pengolahan akhir di tempat pemrosesan sampah (TPS). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah, diukur melalui Indeks Kepuasan, hingga 86,858, dengan klasifikasi B atau memuaskan.

No (1)	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal (2)	Fokus Kajian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Temuan Penelitian (5)
	(JKLI), Volume 21 No.1, 2021			
6.	Nama Penulis : Dwi Afri Liana dan R. Slamet Santoso Judul : Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Blora (Studi Kasus Pasar Blora Kota) Nama Jurnal : ejournal undip, 2019	Tujuan penelitian ini yakni guna mengevaluasi pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 terkait Retribusi Pelayanan Pasar. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud guna menganalisis beragam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora dengan mempergunakan kerangka teoritis implementasi kebijakan	Kualitatif	Temuan dari penelitian memperlihatkan bahwasanya pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora, dengan studi kasus di Pasar Blora Kota, dinilai belum efisien. Berbagai aspek pada peraturan daerah tidak diterapkan dengan optimal, misalnya pengenaan retribusi, penetapan tarif, pemberian insentif, pelaksanaan pemungutan retribusi, pemberian sanksi, serta penyediaan informasi tentang fasilitas pasar, pengelompokan pedagang, dan tarif.

No (1)	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal (2)	Fokus Kajian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Temuan Penelitian (5)
		yang Merilee S. Grindle kembangkan.		
7.	Nama Penulis : Ahmad Fikri Alif Muzzaki, Lailul Mursyidah Judul : Implementation of Waste Management Policy at TPA Jabon District, Sidoarjo Regency. Nama Jurnal : Indonesian Journal of Public Policy Review, Volume 21 (2023)	Sampah ialah materi yang tidak terpakai, tidak diinginkan, atau dibuang yang berasal dari aktivitas manusia serta tidak terbentuk secara alami. Sumber sampah dapat berasal dari berbagai tempat seperti permukiman, area umum, kantor, jalan raya, industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, serta sektor perikanan. Pentingnya manajemen sampah adalah untuk mengontrolnya agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat.	Kualitatif	Temuan dari penelitian memperlihatkan bahwasanya implementasi Kebijakan Persampahan di TPA Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dalam hal komunikasi antar pemerintah belum optimal karena kurangnya komitmen para pihak, kurangnya sumber daya manusia, disposisi yang optimal dan struktur birokrasi yang optimal.

No (1)	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal (2)	Fokus Kajian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Temuan Penelitian (5)
8.	Nama Penulis : Aep Saepudin, Deden Hadi Kushendar Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus Kangpisman Di kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik) Nama Jurnal : Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 No. 5, 2021	Program Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan (KangPisMan) pada pengelolaan sampah di Kota Bandung serta studi ini bertujuan guna menyelidiki praktik pengelolaan sampah melewati Program KangPisMan. Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan kebijakan Program KangPisMan mencakup kesadaran yang kurang dari sumber daya manusia terhadap pentingnya pemilahan sampah, keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah, serta kekurangan dana yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19.	Kualitatif	Implementasi program KangPisMan berlangsung dengan lancar, tetapi berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan guna diperbaiki. Tahapan pelaksanaan program KangPisMan meliputi sosialisasi, pengajuan usulan terkait pengelolaan sampah, dan penyaluran dana. Namun, pada tahapan ini, masih terdapat masalah seperti penundaan penyaluran dana guna pelaksanaan program KangPisMan sebab dampak COVID-19. Kendala-kendala pada kesuksesan kebijakan program KangPisMan meliputi kesadaran yang kurang dari sumber daya manusia terhadap pemilahan sampah, keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah, juga kekurangan dana karena hambatan dana PIPPK bagi program KangPisMan akibat pandemi COVID-19.

No (1)	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal (2)	Fokus Kajian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Temuan Penelitian (5)
9.	Nama Penulis : Ricky Muliawan Hansyar, Halimah Judul : Implementasi Kebijakan Program Pengelolaan Sampah Di Sigli Kabupaten Pidie Nama Jurnal : Jurnal Sains Riset, Volume 12 No.1 , April 2022	Penelitian ini berorientasi pada evaluasi pelaksanaan kebijakan program pengelolaan sampah dengan mempertimbangkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, juga struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan pada penerapan kebijakan program pengelolaan sampah di instansi tersebut	Kualitatif	Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya pengelolaan sampah masih menggunakan pendekatan konvensional yang melibatkan tahapan pengumpulan, pengangkutan, juga pembuangan, meskipun sudah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, serta Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 terkait pengelolaan sampah.
10.	Nama Penulis : M.Aminullah, Tommy Hariyanto, Roos Widjajani	Penelitian ini bermaksud guna mendeskripsikan dan mengidentifikasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Tugas Akhir	Kualitatif	Regional Peraturan No. 3 Tahun 2012 mengatur Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, khususnya pengolahan sampah di Pemrosesan Akhir Lokasi. Eksekusi Perda 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan

No (1)	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal (2)	Fokus Kajian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Temuan Penelitian (5)
	Judul : Study on the Implementation of Waste Management Policies in Probolinggo Regency Nama Jurnal : Cross Current International Journal of Economics, Managements and Media Studies , Volume 4 No.5 September 2022	Tempat Pengolahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo, serta guna menggambarkan serta menganalisis faktor-faktor yang mempermudah serta menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir.		Sampah di Probolinggo Kabupaten didorong oleh ketersediaan yang berkompeten sumber daya manusia, SOP yang sesuai, dan fungsional alat pengolah limbah. Sedangkan unsur penghambat adalah pertumbuhan harian dalam produksi sampah, Menimbang jumlah sampah yang terus meningkat, Probolinggo Pemkab harus mengusulkan yang lebih signifikan anggaran pengelolaan sampah. Jadi, limbah pengelolaan sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan mengakuisisi lebih banyak truk dan modernisasi peralatan pengolah limbah.

Sumber: Diolah oleh penulis

Perbedaan dan Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang Lina Nurlina, dkk lakukan.

Pada penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang Lina Nurlina, dkk lakukan, yakni keduanya menerapkan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini juga fokus pada peningkatan unsur - unsur seperti menumbuhkan kesadaran Masyarakat pada pengelolaan sampah, konsistensi pelaksana dan dukungan publik yakni dari Masyarakat dan badan usaha.

Perbedaan antara keduanya terletak pada teori implementasi kebijakan, pada penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlina, dkk Dalam penelitian ini, digunakan teori implementasi kebijakan yang Budiman Rusli ajukan, yang mencakup aspek isi atau konten kebijakan, pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan lingkungan kebijakan. Namun, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan campuran dalam teori implementasi kebijakan, sebagaimana yang Merilee S. Grindle jabarkan. Perbedaan serta Persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang Bella Dwi Hastuti, dkk lakukan.

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang Bella Dwi Hastuti, dkk lakukan, yakni keduanya menerapkan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini juga menggunakan faktor pendukung dan penghambat yang dijabarkan oleh Edward III yakni sumberdaya, disposisi, komunikasi, dan struktur birokrasi.

Perbedaan antara keduanya terletak pada informan penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Bella Dwi Hastuti, dkk menerapkan teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini dipergunakan teknik *purposive sampling* beserta teknik *accidental sampling*.

Perbedaan dan Persamaan diantara penelitian ini dan penelitian yang M.Daeni dan Husnul Rizqi lakukan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh M.Daeni dan Husnul Rizqi yaitu sama-sama bertujuan mengetahui implemetasi kebijakan khususnya Perda setempat tentang pengelolaan sampah. Pada penelitian ini juga menerapkan metode pendekatan kualitatif, yang penyusunan datanya dijalankan melalui observasi, wawancara mendalam.

Perbedaan antara keduanya ada pada lokus dan fokus penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh M.Daeni dan Husnul Rizqi berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Kecamatan Kedungpane Kota Semarang dan fokus penelitian ini adalah penyedia sarana beserta prasarana pengelolaan sampah di TPS, TPST juga TPA. Pada penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan fokus penelitian ini yakni peningkatan aspek-aspek sebagai contohnya menggugah kesadaran Masyarakat pada pengelolaan sampah, konsistensi pelaksana dan dukungan publik yakni dari Masyarakat dan badan usaha.

Perbedaan serta Persamaan diantara penelitian ini dan penelitian yang Ricky Muliawan Hansyar, Halimah lakukan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ricky Muliawan Hansyar, Halimah yaitu sama-sama mempergunakan teori Edward III dalam mengamati faktor pendukung dan penghambat berdasarkan variabel yang dijabarkan oleh Edward III yakni sumberdaya, disposisi, komunikasi, juga struktur birokrasi. Penelitian ini juga menerapkan Teori yang dijabarkan oleh Edward III guna menganalisis faktor pendukung serta faktor penghambat.

Perbedaan antara keduanya ada pada pendekatan implementasi, pada penelitian yang dilakukan oleh Ricky Muliawan Hansyar menggunakan pendekatan implementasi *Top Down*. Pada penelitian ini mempergunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan *mix* yang Merilee S. Grindle jabarkan.

Perbedaan serta Persamaan diantara penelitian ini dan penelitian yang Tri Yudianto, dkk jabarkan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang Tri Yudianto, dkk lakukan, yakni keduanya bertujuan mengetahui implemetasi kebijakan khususnya Perda setempat tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Perbedaan antara keduanya terletak pada Perbedaan antara keduanya terletak pada lokus penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Tri Yudianto, dkk berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Temurejo, Kecamatan Tunjungan. Pada penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan

Menurut penelitian terdahulu yang sudah dibahas oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penelitian dengan lokasi yang sama dengan yang ditulis oleh peneliti, namun kesepuluh penelitian terdahulu di atas memiliki fokus yang sama yaitu meneliti implementasi dalam kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil rujukan melalui penelitian terdahulu, peneliti akan mengkaji analisis implementasi pada penelitian ini yaitu dari segi teori hal yang harus dipenuhi dalam implementasi dan juga teori faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi.

1.6.2 Administrasi Publik

Secara harfiah, kata "administrasi" bersumber dari gabungan dua kata dalam bahasa Latin, yaitu "ad" serta "ministrate" yang artinya "melayani" (dalam Anggara, 2016:13). Administrasi merujuk pada serangkaian proses dan upaya menyeluruh dalam mengelola segala aktivitas yang berlangsung di sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, istilah "publik" merujuk pada sekelompok orang yang mempunyai kesamaan dalam hal pemikiran, sikap, perasaan, harapan,

serta tindakan berdasarkan norma yang diberlakukan di masyarakat (dalam Pasolong, 2014 :6).

Berdasarkan pemaparan Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010 :8) Administrasi publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dalam melayani kepentingan rakyat. Salah satu tujuan utamanya adalah mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah agar lebih tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, inti dari administrasi publik adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. Hal ini dilakukan agar praktik manajerial dalam birokrasi pemerintahan dapat dioptimalkan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan Nigro dan Nigro (dalam Anggara, 2016:46), administrasi publik adalah perwujudan dari usaha yang dijalankan dengan bersama-sama pada lingkungan kerja publik yang mencakup tiga cabang, yakni yudikatif, legislative juga eksekutif. Yeremias T Keban (2014:4), menerangkan bahwasanya pada awalnya, istilah ini mengacu pada peranan pemerintah yang diserahkan kekuasaan untuk mengambil langkah-langkah inovatif demi kepentingan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah sekelompok orang yang wajib tunduk serta patuh, juga melaksanakan kebijakan yang mana sudah menjadi ketetapan pemerintah. (Keban, 2014: 4). Dimock, Dimock, & Fox (dalam Keban,

2014: 5) mengungkapkan bahwasanya Administrasi publik dapat diartikan sebagai aktivitas memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Berdasarkan pemaparan Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3), administrasi publik adalah pengelolaan sumber daya yang terstruktur serta terkoordinasi menurut kebijakan yang berlaku. Koordinasi ini mencakup perumusan, implementasi, dan pengelolaan kebijakan yang ditujukan untuk publik. Administrasi publik dianggap sebagai seni dan ilmu dalam pengaturan kebijakan publik serta pelaksanaan tugas yang diamanatkan. Tujuannya adalah menemukan solusi atas persoalan guna menyempurnakan sumber daya manusia, organisasi, dan finansial.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry telah berkali-kali memperbarui artikel reviewnya sejak tahun 1975, di mana awalnya ia mengakui adanya empat paradigma dalam administrasi publik, namun dalam publikasi terakhirnya jumlah tersebut menjadi enam paradigma. Namun, Peters berpendapat bahwa tidak semua tahapan perkembangan tersebut dapat mencapai status paradigma seperti yang dijelaskan dalam filsafat ilmu, meskipun memiliki beberapa karakteristik tertentu (baik dan buruk). Karena itu, menurut Peters, pergeseran paradigma yang jelas hanya ada tiga. Berdasarkan pandangan Henry, paradigma pada administrasi publik mampu dibagi seperti berikut:

- a. Paradigma pertama atau paradigma dikotomi Politik administrasi dari tahun 1900-1926. Paradigma ini

memfokuskan pada pemisahan urusan politik dan urusan administrasi di dalam fungsi utama pemerintahan. Paradigma ini menekankan pada penekanan bahwa urusan politik berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan, politik, serta kebijakan. Sedangkan urusan administrasi memiliki fokus terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi, kepegawaian, penyusunan anggaran di dalam sebuah birokrasi.

- b. Paradigma kedua muncul pada tahun 1927-1937 dengan munculnya prinsip-prinsip dalam mengembangkan administrasi negara. Pada masa ini, administrasi negara mengalami perkembangan baru dan meraih puncak reputasinya. Sekitar tahun 1930-an, administrasi negara banyak memperoleh masukan dari bidang lain sebagai contohnya industri serta pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwasanya administrasi negara mampu diterapkan di setiap tatanan kehidupan. Tokoh-tokoh pemikir pada periode ini diantaranya Henry Fayol, Frederick W. Mary Parker Follet, Taylor (Prinsip Manajemen Ilmiah), dan Max Weber yang menitikberatkan pada pengaruh manajemen pada administrasi negara. Masa ini juga ditandai dengan terbitnya buku "Paper on the Science of Administration" oleh Luther H. Gulick dan

Lyndall Urwick pada tahun 1937. Dalam buku tersebut, disampaikan tujuh prinsip administrasi yang dikenal dengan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting).

- c. Paradigma ketiga yakni penguraian tentang administrasi negara sebagai cabang ilmu politik yang berkembang pada periode 1950-1970. Tahap ini bertujuan guna mengkonsolidasikan kembali hubungan konseptual diantara administrasi negara dan ilmu politik. Hal tersebut didasari pada ruang lingkup administrasi negara yang pada dasarnya adalah kekuasaan baik kepada administrasi negara itu sendiri maupun kepada masyarakat. Dengan kembalinya administrasi negara kepada induk atau bisa disebut ilmu politik, maka terjadi pembaruan locus yaitu birokrasi pemerintahan namun dengan fokusnya kembalinya administrasi publik kepada ilmu politik. Perkembangan yang terjadi pada paradigma ini berfungsi untuk mengurangi ketegangan di berbagai pihak yang merasa menganut perbedaan antara ilmu administrasi negara dengan ilmu politik.
- d. Paradigma keempat pada periode 1956-1970 yakni masa administrasi negara selaku ilmu administrasi. Prinsip

manajemen dilakukan pengembangan kembali dengan cara ilmiah serta mendalam sebagai contohnya analisis manajemen, perilaku organisasi, pengimplementasian teknologi modern. Anggapan bahwa ilmu manajemen penting dalam administrasi mulai dipraktekkan secara langsung disertai dengan teknik organisasi. Pada periode paradigma ini keorganisasian berkembang sangat pesat serta melibatkan peran para ilmuwan dalam menganalisa bentuk negara dimana mereka mulai berfikir secara filosofis mengenai makna dari sebuah negara.

- e. Paradigma kelima muncul sejak dekade 1970, muncul paradigma baru dalam studi administrasi publik yang memusatkan perhatian pada pemerintahan sebagai sebuah organisasi. Fokus utamanya tidak lagi semata-mata mengkaji administrasi publik sebagai bidang ilmu teoritis, melainkan juga mengembangkan pemahaman mendalam tentang dinamika organisasi. Perhatian khusus diberikan pada bagaimana dan mengapa organisasi beroperasi, perilaku individu di dalamnya, serta proses pengambilan keputusan dalam konteks organisasi. Dalam paradigma ini, studi administrasi publik banyak mengarah pada penerapan teori dan teknik manajemen modern, analisis politik-ekonomi,

serta proses perumusan, analisis, dan pengukuran dampak dari berbagai kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah. Dengan demikian, administrasi publik tidak lagi dipandang sebagai disiplin yang terisolasi, melainkan terintegrasi erat dengan dinamika organisasi pemerintahan secara keseluruhan. (Anwaruddin & Ed, 1927).

- f. Paradigma keenam yang berkembang sejak 1997 menempatkan administrasi publik sebagai Administrasi Publik Baru atau Governance. Paradigma ini memfokuskan pada usaha pengorganisasian, penggambaran, atau pembuatan sebuah organisasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan bersamaan sebuah sistem yang demokratis serta lebih responsif dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ada anggapan bahwa perspektif administrasi publik sebelumnya seperti menggambarkan negara sebagai sebuah perusahaan sehingga munculah konsep new public service yang mengemukakan gagasan bahwa negara seharusnya menyediakan pelayanan terhadap masyarakat dengan demokratis, jujur, dan akuntabel. Pada paradigma administrasi publik kontemporer, masyarakat sipil tidak lagi dilihat sebagai pihak yang harus tunduk pada kebijakan

pemerintah. Sebaliknya, warga negara justru diposisikan sebagai pemangku kepentingan utama dan pemilik yang sah atas penyelenggaraan pemerintahan. Mereka tidak hanya menjadi objek pasif, tetapi memiliki kapasitas untuk terlibat secara aktif dan bertindak bersama-sama dalam upaya mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan bersama. Di dalam paradigma ini, masyarakat diposisikan sebagai publik bukan sebagai pelanggan atau customer dan memiliki peran yang vital dalam sebuah negara. Administrator dituntut untuk tanggap terhadap kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan negara.

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan paradigma, penelitian ini menggunakan paradigma 6 Good Governance di karenakan kebijakan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 terkait pengelolaan sampah ialah pendekatan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efisiensi, keadilan, dan responsivitas pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait pengelolaan sampah. Paradigma ini menempatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai mitra dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah secara holistik.

1.6.4 Kebijakan Publik

Istilah "kebijakan publik" adalah konsep yang amat luas dan kompleks maknanya bila dibandingkan dengan memahami kedua kata tersebut secara terpisah. Keberadaan kebijakan publik merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah negara yang berdaulat. Sebuah negara yang mengabaikan atau tidak memiliki kebijakan publik mampu dinilai sebagai sebuah kegagalan, dikarenakan kehidupan bermasyarakat sekedar akan diatur oleh segelintir orang atau kelompok tertentu yang bertindak secara semena-mena layaknya seorang tiran untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya semata. Dengan kata lain, kehadiran kebijakan publik menjadi prasyarat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, adil, dan melindungi kepentingan seluruh warga negara secara merata tanpa diskriminasi. (Nugroho 2009:11).

Salah satu fungsi utama dari kebijakan publik adalah mengatur hubungan dan interaksi antara negara selaku penyelenggara kekuasaan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan. Namun, perlu disadari betapa signifikan dan vitalnya peran kebijakan publik dalam kehidupan bernegara. Setiap pemegang kekuasaan, baik itu pemerintah maupun penguasa lainnya, pasti memiliki kepentingan untuk mengendalikan negara sekaligus mengelolanya. Mengelola dalam konteks ini bukan sekedar mengontrol, tetapi lebih dari itu, bagaimana membuat negara menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi rakyatnya. Inilah tugas hakiki pemerintah, yaitu

menjalankan roda pemerintahan sekaligus mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan bernegara melalui instrumen kebijakan publik. Dengan kata lain, eksistensi kebijakan publik merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara agar merealisasikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Menurut Carl Friedrich, kebijakan mampu dipahami menjadi serangkaian tindakan yang diarahkan guna mencapai tujuan tertentu. Tindakan tersebut dirumuskan dan diusulkan oleh aktor-aktor yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun pemerintah sendiri dalam konteks lingkungan tertentu. Perumusan kebijakan ini menjadi penting mengingat adanya berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan. Karenanya, kebijakan tidak sekedar rencana saja, tetapi juga upaya untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia supaya tujuan yang ditetapkan mampu diraih dengan efektif. Konsep ini menekankan bahwasanya kebijakan merupakan proses yang dinamis, melibatkan pelbagai aktor, serta berorientasi pada pencapaian sasaran dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada. (Manongga et al., 2021)

Merujuk pada beragam definisi kebijakan publik yang dipaparkan para ahli, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Sampah mampu diklasifikasikan menjadi sebuah produk kebijakan publik. Regulasi tersebut adalah hasil dari proses politik

yang melibatkan perundingan dan pengesahan oleh lembaga legislatif daerah (DPRD), serta proses administratif di lingkungan pemerintah daerah. Lahirnya peraturan ini diharapkan dapat menjawab tuntutan dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan nyaman dari permasalahan sampah. Dengan kata lain, kebijakan pengelolaan sampah ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan dan aspirasi warga melalui sebuah instrumen hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merefleksikan esensi kebijakan publik sebagai alat untuk mengatasi persoalan bersama demi tercapainya kemaslahatan masyarakat luas.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahapan krusial setelah sebuah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi terkait. Tahap ini meliputi serangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi capaian kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi keputusan di atas kertas yang tidak dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Studi terkait implementasi kebijakan menjadi sangat penting pada disiplin administrasi publik dan kebijakan publik, karena pada tahap inilah sebuah kebijakan benar-benar dioperasionalkan. Implementasi menjembatani antara formulasi kebijakan, seperti pengesahan undang-undang, instruksi pemerintah, putusan pengadilan, atau regulasi; dengan konsekuensi nyata

dari kebijakan tersebut bagi kelompok sasaran yang terdampak. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya di lapangan.

Pada intinya, implementasi kebijakan merujuk pada proses mengoperasionalkan sebuah regulasi atau kebijakan ke dalam tindakan nyata. Anderson dan Henry menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik dilakukan oleh institusi pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan warga negara. Sementara itu, Howlett dan Ramesh mendefinisikan implementasi sebagai proses menerjemahkan rencana atau program kebijakan ke dalam praktik lapangan. Dengan kata lain, implementasi merupakan upaya untuk mengaplikasikan esensi dari sebuah kebijakan ke dalam aksi nyata sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan serupa dijabarkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang menyebut implementasi sebagai aktualisasi dari ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk menangani permasalahan tertentu pada kelompok sasaran tertentu pula. Jadi implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial untuk mewujudkan manfaat dari sebuah kebijakan agar dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata. (Agustiono, 2016)

1.6.6. Model Implementasi

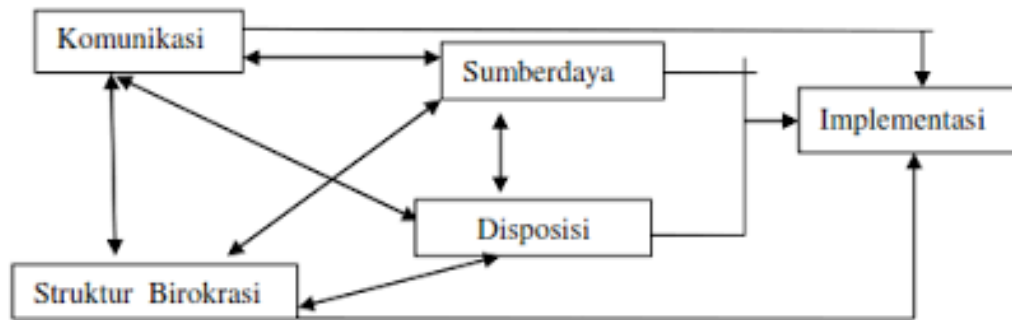
Edward III memaknai implementasi kebijakan sebagai tahapan lanjutan setelah sebuah kebijakan ditetapkan, di mana kebijakan tersebut dioperasionalkan sehingga dapat memberikan konsekuensi nyata bagi kelompok sasaran. Sementara itu, Grindle memandang implementasi sebagai serangkaian proses tindakan administratif yang dilakukan untuk mengeksekusi sebuah program kebijakan. Pandangan serupa Van Meter dan Van Horn jabarkan, yang menggambarkan implementasi kebijakan sebagai serangkaian aksi dari para pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan sebelum keputusan kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan. Model pendekatan yang diajukan Van Meter dan Van Horn sifatnya top-down atau dikenal sebagai "Model Implementasi Kebijakan". Model ini mengidentifikasi enam variabel kunci yang memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan, yakni:

1. Kejelasan Tujuan Kebijakan. Tujuan kebijakan perlu ditetapkan dengan jelas dan terperinci, tidak hanya sebatas generalisasi. Hal ini untuk memberikan standar yang konkrit dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan
2. Sumber Daya. Sumber daya seperti pendanaan atau insentif lainnya menjadi faktor penting untuk memicu dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan secara efektif.

3. Karakteristik Agen Pelaksana. Karakteristik, nilai, norma, dan pola hubungan yang berlaku di lembaga pelaksana berpotensi memengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan.
4. Sikap ataupun Kecenderungan Para Pelaksana. Para pelaksana kebijakan harus paham akan maksud, standar, dan tujuan khusus dari kebijakan tersebut. Disposisi atau sikap mereka terhadap tujuan kebijakan sangat menentukan keberhasilannya. Jika para pelaksana menentang tujuan kebijakan, besar kemungkinan implementasi akan gagal.
5. Komunikasi serta koordinasi yang baik antar lembaga pelaksana menjadi kunci suksesnya implementasi kebijakan lintas sektor/lembaga.
6. Kondisi Lingkungan Eksternal. Faktor lingkungan seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat memberi dampak signifikan terhadap kinerja implementasi suatu kebijakan meskipun seringkali diabaikan.

Model Implementasi Kebijakan Edward III menurut Winarno (2016:180) tersusun atas sumber, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang digambarkan seperti berikut :

Gambar 1.6 Model Implementasi Kebijakan Edward



Sumber : Winarno (2016:180)

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dijelaskan dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

1) Komunikasi

Komunikasi yakni proses penyampaian informasi dari komunikator terhadap komunikan. Pada konteks implementasi kebijakan publik, informasi terkait kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana agar mereka mengetahui persiapan dan tindakan yang wajib dijalankan guna mencapai tujuan dan sasaran kebijakan seperti yang diharapkan. Adapun tiga unsur penting pada komunikasi kebijakan:

- a) Sosialisasi, supaya kebijakan publik tidak sekedar disampaikan terhadap para pelaksana, namun juga terhadap kelompok sasaran dan pemangku kepentingan lainnya, baik dengan langsung ataupun tidak langsung.

- b) Kejelasan, kebijakan yang disampaikan harus jelas sehingga pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak berkepentingan memahami tujuan, maksud, sasaran, dan substansi kebijakan sehingga mereka tahu persiapan dan langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikannya dengan efektif, juga efisien.
- c) Konsistensi, kebijakan yang diambil harus konsisten agar tidak membingungkan para pelaksana, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Sumberdaya

Perintah dalam implementasi merupakan hal yang harus dijalankan secara cermat, jelas dan terus konsisten hal ini diharapkan agar para pelaksana implementasi berjalan efektif. Ada tiga unsur dalam sumber yaitu ;

- a) Sumber daya manusia, yaitu tersedianya jumlah pelaksana kebijakan yang cukup dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pelaksana harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai untuk menjalankan kebijakan secara optimal.
- b) Sumber daya anggaran, karena keterbatasan anggaran akan menghambat implementasi kebijakan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, program-program tidak mampu

dijalankan secara maksimal, bahkan dapat menurunkan semangat dan komitmen para pelaksana lapangan.

- c) Sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan fasilitas pendukung seperti peralatan, perlengkapan, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan secara langsung dan menyeluruh sesuai tugas yang ditetapkan.

3) Disposisi

Agar implementasi berjalan efektif, para implementor harus memiliki keinginan dan sikap positif dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi atau karakteristik yang dimiliki implementor, seperti watak, nilai, dan pandangannya akan sangat memengaruhi bagaimana mereka menjalankan kebijakan di lapangan. Apabila para pelaksana memiliki disposisi yang mendukung dan sejalan dengan maksud pembuat kebijakan, maka mereka akan mengimplementasikannya dengan baik dan berdasarkan tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, bilamana implementor mempunyai sikap dan kecenderungan yang bertentangan atau menolak kebijakan, alhasil proses implementasi berpotensi mengalami hambatan atau bahkan kegagalan. Dengan demikian, membangun komitmen dan sikap positif

para pelaksana kebijakan menjadi faktor krusial bagi suksesnya implementasi di lapangan. Adapun dalam hal ini meliputi ; 1) komitmen, 2) kejujuran dan 3) sifat demokratis.

4) Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi Struktur organisasi birokrasi yang berperan pada implementasi kebijakan membawa dampak signifikan pada keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Dalam struktur ini terdapat pembagian kerja yang jelas, pembidangan tugas dan fungsi yang berbeda namun terintegrasi, serta hierarki perintah dan pelaporan yang terkoordinir sesuai dengan spesifikasi pekerjaan masing-masing. Terdapat dua aspek penting dalam struktur birokrasi pelaksana yang memengaruhi implementasi. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP) , dan 2) fragmentasi.

Van Meter dan Van Horn pada teorinya berpendapat bahwasanya pelaksanaan suatu kebijakan tentunya berpengaruh dari sifat kebijakan itu sendiri. Antara aspek isu kebijakan dan penerapan kebijakan tersebut di lapangan, akan menghasilkan dua kemungkinan, keberhasilan atau kegagalan, yang dapat dilihat dari faktor prestasi kerja (performance).

Berdasarkan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142), dalam model ini, terdapat tiga peran utama, yakni kebijakan publik,

seberapa jauh pengaruh penyimpangan kebijakan baru dari kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya, terutama kebijakan serupa yang telah ada. Kedua, implementasi juga akan berpengaruh pada ada atau tidaknya perubahan dari organisasi/institusi pelaksana paket kebijakan tersebut. Secara utama, kontrol dan pengelolaan terhadap kepatuhan pelaksanaan kebijakan menjadi faktor utama penentu prosedur implementasi. Adapun enam variabel yang membawa dampak pada kinerja kebijakan publik, yakni:

1. Standar dan Sasaran

Kebijakan Faktor pertama yang digunakan untuk mengukur pengaruh kinerja kebijakan publik adalah berdasarkan ukuran beserta realisasi tujuan kebijakan yang ada terhadap kondisi sosio-kultural yang terdapat di masyarakat pada tingkat pelaksana kebijakan. Seringkali, kebijakan yang memiliki tujuan yang terlalu ideal dan cenderung tidak realistis, tidak akan dapat diterapkan secara optimal kepada masyarakat, dan akan sulit untuk dirasakan kebermanfaatannya. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah tujuan yang hendak diraih memang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada atau tidak.

2. Sumberdaya Kebijakan

Faktor lainnya adalah dari kemampuan (kapabilitas) yang dimiliki oleh suatu wilayah negara dalam mempergunakan sumber daya yang dimilikinya. Pada konteks ini, faktor individu sebagai bentuk SDM, sangat berpengaruh dalam melihat apakah suatu wilayah tersebut mampu secara mandiri memanfaatkan sumber daya lainnya yang mereka miliki, seperti capital (teknologi) ataupun sumber daya alam. SDM yang baik dan mumpuni tentunya dapat memanfaatkan segala potensi yang ada hingga pada level yang maksimal, sehingga akan menghasilkan output yang lebih berkualitas karena pada dasarnya tenaga yang digunakan untuk mengolahnya pun berkualitas. Kompetensi dan kapabilitas SDM yang nihil, hanya akan menghasilkan keluaran yang tidak optimal sehingga akan merusak potensi yang ada.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan

Faktor selanjutnya adalah ada atau tidaknya komunikasi dan pertukaran informasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mencapai tujuan kebijakan. Masing-masing pihak yang terlibat, haruslah bersifat saling terbuka, dan saling bahu-membahu menyelesaikan segala pekerjaan yang ada supaya mampu meraih hasil yang maksimal, efektif, serta efisien.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Van Meter dan Van Horn mengamati bahwasanya implementasi kebijakan tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencerminkan pola hubungan yang berulang di lembaga eksekutif, yang memiliki keterkaitan potensial dan nyata dengan pelaksanaan kebijakan menurut tugas dan tanggung jawab yang mereka tanggung.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

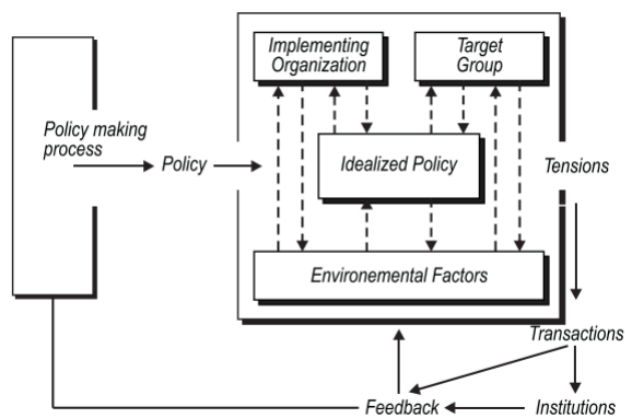
Faktor lainnya adalah variabel-variabel eksternal yang dapat memberikan kontribusi terhadap berhasil atau tidaknya sebuah instrumen kebijakan publik pada implementasinya. Beberapa contoh dari faktor eksternal ini adalah ekonomi, sosial, politik, yang masing-masing diketahui dapat memiliki dampak tersendiri bila tidak terkontrol gejolaknya di dalam negeri. Oleh sebab itu, penerapan kebijakan pastinya akan melihat apakah faktor-faktor tersebut sedang dalam keadaan kondusif atau tidak, baru diterapkan secara luas di dalam masyarakat.

6. Sikap Pelaksana

Sikap penerimaan ataupun penolakan dari para pelaksana kebijakan nantinya membawa dampak signifikan pada keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan kebijakan. Situasi ini dapat terjadi

dikarenakan kebijakan yang diberlakukan mungkin tidak berasal dari inisiatif masyarakat lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan yang dihadapi serta pengalaman yang dirasakan.

Gambar 1.8 Model Proses Implementasi Kebijakan Smith (1973)



Smith (1973) memandang implementasi kebijakan sebagai sebuah proses atau alur yang bermaksud guna menciptakan perubahan sosial dan politik dalam masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Dalam perspektif ini, kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Smith mengidentifikasi empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:

- 1. Idealized Policy*
- 2. Target Groups*
- 3. Implementing Organization*
- 4. Environmental Factors.*

1.6.7. Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa atau residu dari aktivitas keseharian manusia maupun proses alamiah yang berbentuk padat. Terdapat pula kategori sampah spesifik yang membutuhkan penanganan khusus menurut konsentrasi, sifat, atau volumenya yang berbeda.

Sumber utama sampah yang mudah membusuk yakni sisa-sisa makanan, baik dari proses pengolahannya ataupun sisa konsumsi. Perihal inilah yang mengakibatkan adanya variasi jenis dan volume sampah di setiap wilayah akibat perbedaan pola konsumsi yang merupakan cerminan dari standar hidup dan gaya masyarakat setempat. (Singhirunnusorn, 2012:688).

Pengelolaan sampah terpadu (integrated solid waste management) merupakan suatu kerangka acuan yang mengarahkan bagaimana sebuah sistem pengelolaan sampah direncanakan, diimplementasikan, dianalisis, serta dioptimalkan, baik untuk sistem yang baru maupun yang sudah ada

sebelumnya. Konsep ini searah dengan amanat undang-undang yang menekankan pengelolaan sampah melewati prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang merupakan tahapan penting pada paradigma pengelolaan sampah modern. Artinya, sebelum sampah dimusnahkan atau dihancurkan, terlebih dahulu harus melalui upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pendaurulangan untuk meminimalisir volume sampah yang harus dibuang. Dengan demikian, pengelolaan sampah terpadu dengan prinsip 3R ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan mulai dari sumbernya.

1.6.8. Pendekatan Implementasi

1) Pendekatan *Top Down*

Pendekatan *Top Down* menjadi pendekatan yang paling umum digunakan pada masa awal penerapan studi terhadap implementasi kebijakan. Pendekatan ini memiliki banyak perbedaan di kalangan para ahli, bahkan di antaranya justru lebih mengunggulkan pendekatan bottom up yang sebaliknya. Akan tetapi pada akhirnya, pendekatan ini berangkat menjadi titik tolak yang general dalam pengembangan kerangka analisis terhadap studi implementasi, terutama di bidang kebijakan publik.

Secara sederhana, pendekatan ini memusatkan alur kegiatan kebijakan publik dari otoritas pusat ke otoritas-otoritas di bagian bawah. Segala bentuk instrumen kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat,

akan dibawa dan dilaksanakan oleh instansi-instansi yang berada di bawah naungannya. Sabatier (1986) menjelaskan bahwasanya pendekatan top-down dijalankan oleh para peneliti melalui langkah seperti berikut: “they started with policy decision (usually statute) and examined the extent to which its legally-mandated objectives were achieved over time and why”. Oleh sebab itulah, pendekatan ini disebut juga sebagai policy centered, dikarenakan pada dasarnya para peneliti melihat apakah kebijakan yang telah diterapkan oleh otoritas pusat mampu terlaksana sebagaimana tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya atau tidak.

Secara garis besar, tahapan kerja para peneliti yang menerapkan pendekatan top down menurut Erwan Agus Purwanto dalam bukunya Implementasi Kebijakan Publik yakni seperti berikut:

- a. Menentukan kebijakan yang nantinya dikaji.
- b. Mempelajari berkas-berkas dan dokumentasi kebijakan yang ada guna melihat tujuan dan sasaran yang hendak diraih melalui kebijakan tersebut secara formal.
- c. Mengidentifikasi keluaran-keluaran apa saja yang dihasilkan oleh paket kebijakan tersebut sebagai instrumen pelaksana dari pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.
- d. Mengidentifikasi penerimaan kelompok sasaran dari keluaran kebijakan tersebut.

- e. Mengidentifikasi ada atau tidaknya manfaat yang kelompok sasaran rasakan dari keluaran kebijakan tersebut.
- f. Mengidentifikasi dampak yang dimunculkan pada kelompok sasaran sebagai akibat dari kebermanfaatan kebijakan yang telah mereka terima sebelumnya.

Pelaksanaan pendekatan ini dikenal dengan istilah pendekatan command and control. Sebagaimana arti dari terminologi tersebut, fokus utama dari pendekatan ini adalah aspek perintah dan pelaksanaan yang diberikan. Suatu kebijakan yang ada akan bergantung dari jelas atau tidaknya perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Bawahan yang telah menerima perintah tersebut, kemudian dikontrol oleh kepentingan di atasnya supaya segala bentuk aktivitas pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan.

2) Pendekatan *Bottom Up*

Jika pendekatan sebelumnya memusatkan segala sesuatu dari kemauan otoritas atas, pada pendekatan bottom up yang sejatinya adalah kritik diberikan untuk melihat bahwa sejatinya keberhasilan suatu program kebijakan merupakan hal yang harus diperhatikan pada bentuk hubungan antara kepentingan bawah dengan pembuat kebijakan. Segala bentuk aktivitas yang ada di lapangan, tidak selalu sejalan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, sehingga perlu

dilakukan penyesuaian kembali (negosiasi) antara para pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan.

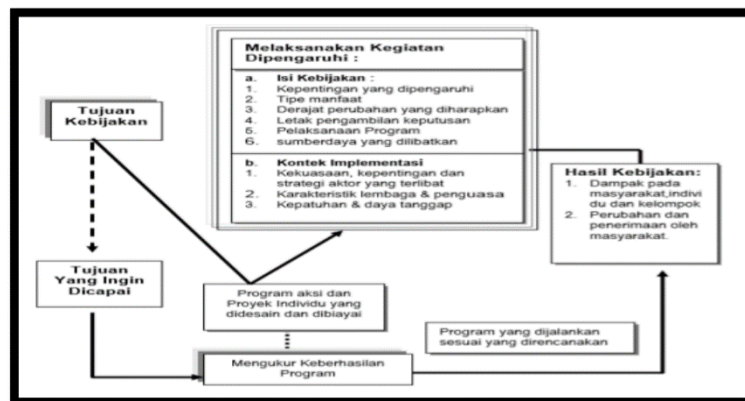
Menurut Adam Smith pada tahun 1973, penerapan kebijakan dinilai menjadi sebuah proses atau alur. Model Smith ini menilai proses kebijakan ini adalah proses antara perubahan sosial serta politil, di mana kebijakan yang ada sebelumnya tidak terlepas dari pengadaan perbaikan maupun perubahan masyarakat yang menjadi sasaran program kebijakan. Berdasarkan pemaparan Smith, implementasi kebijakan bergantung pada empat variabel, yakni:

1. *Idealized policy*, kebijakan yang ideal dan telah dirumuskan sebagaimana harapan dari pembuat kebijakan, fungsinya adalah untuk mendorong serta merangsang pelaksanaan kelompok.
2. *Target groups*, yakni bagian dari policy stakeholder yang dikehendaki mampu mengadopsi pola-pola interaksi seperti yang perumus kebijakan harapkan.
3. *Implementing organization*, adalah mereka yang berbentuk badan-badan atau institusi-institusi yang mendapat tugas untuk menerapkan kebijakan.
4. *Environmental factors*, yakni faktor-faktor yang mampu membawa dampak pada penerapan suatu kebijakan,

contohnya adalah budaya, sosial, stabilitas ekonomi dan politik, dan lain-lain.

3) Pendekatan *Mix*

Gambar 1.9 Model Proses Implementasi Grindle



Grindle (dalam Agustino, 2014) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik bisa dinilai berdasarkan pencapaian hasil akhir (outcomes), yang mengacu pada apakah tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak. Evaluasi ini melibatkan dua aspek: apakah proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana atau tidak, dan dampak beserta tingkat perubahan yang kelompok sasaran alami.

Keberhasilan implementasi juga sangat bergantung pada tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang tersusun atas isi kebijakan (*content of policy*) beserta konteks kebijakan (*context of policy*).

A. *Content of Policy* menurut Grindle yakni:

- *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Setiap implementasi kebijakan pasti melibatkan berbagai kepentingan yang berpengaruh, sehingga sejauh manakah kepentingan-kepentingan tersebut membawa dampak pada pelaksanaan kebijakan perlu dipertimbangkan.
- *Type of Benefits* (tipe manfaat) sebuah kebijakan wajib memberi beragam jenis manfaat yang memperlihatkan dampak positif dari implementasinya.
- *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang hendak diraih) Derajat atau tingkat perubahan yang diinginkan lewat implementasi kebijakan perlu jelas skalanya.
- *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan) Lokasi pengambilan keputusan dalam kebijakan memiliki peran penting bagi pelaksanaannya, sehingga perlu diperhitungkan di mana keputusan diambil untuk kebijakan yang akan diimplementasikan.
- Pelaksanaan kebijakan atau program memerlukan dukungan pelaksana kebijakan yang kompeten dan berkemampuan agar berhasil

- *Resources Committed* (sumber-sumberdaya yang digunakan)
Sumber daya yang memadai wajib tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan agar berlangsung dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, juga strategi dari aktor yang terlibat)
Pada konteks implementasi kebijakan, perlu memperhitungkan kekuatan, kepentingan, dan strategi yang para aktor yang terlibat gunakan untuk memperlancar pelaksanaannya.
- *Institution dan Regime Characteristic* (karakteristik lembaga beserta rezim yang berkuasa) Karakteristik lembaga beserta rezim yang berkuasa di lingkungan kebijakan dijalankan nantinya memengaruhi keberhasilan implementasinya.
- *Compliance and Responsivisness* (tingkat kepatuhan serta adanya respon dari pelaksana) Tingkat kepatuhan serta respon dari para pelaksana ketika memberi tanggapan kebijakan tersebut juga menjadi faktor penentu keberhasilan.

Berdasarkan pemaparan pendekatan implementasi, Penulis memilih untuk mengadopsi teori implementasi yang Merilee S ajukan. Grindle. Hal ini dikarenakan teori tersebut lebih cocok untuk riset atau penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 pada Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Teori ini lebih efektif dalam meneliti pihak eksternal. Penelitian ini lebih berfokus pada pihak eksternal yang menjadi objek penelitian, sehingga pendekatan mix top down beserta bottom up yang diusulkan oleh model Merilee S. Grindle lebih sesuai untuk digunakan.

1.6.9. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Menurut George Edwards III, terdapat kondisi abstrak di mana syarat implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil, harus memenuhi beberapa variabel utama. Variabel tersebut berupa komunikasi, sumber daya, sikap, beserta struktur birokrasi. Masing-masing dari keempat faktor tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, serta daya ikat yang juga berbeda pada hubungannya dengan implementasi kebijakan publik. Meski demikian, keempat variabel tersebut satu sama lain memiliki daya tarik hubungan yang sama karena keempatnya memiliki posisi yang setara dalam menentukan pemahaman mengenai implementasi kebijakan.

Beragam faktor yang berpengaruh pada implementasi menurut George C. Edward III antara lain:

a. Komunikasi

Baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama mengetahui informasi adanya paket kebijakan publik terkait, sehingga kedua pihak tersebut dapat menyiapkan dan melaksanakan masing-masing tugasnya dengan baik.

b. Sumber daya

Terdiri atas sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran (keuangan), piranti atau teknologi (capital), serta kewenangan (otoritas).

c. Disposisi

Masing-masing pihak diwajibkan untuk dapat bersungguh-sungguh dan mau melibatkan dirinya dalam pelaksanaan kebijakan publik.

d. Struktur Birokrasi

Aspek ini meliputi struktur organisasi dan pembagian yang jelas masing-masing tugas yang setiap pihak yang terlibat memiliki pada pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, struktur birokrasi juga berfungsi untuk menempatkan kedudukan masing-masing pihak tersebut secara lebih rigid.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Secara konseptual penelitian ini yakni Implementasi Kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah yang difokuskan pada Kajian Implementasi Kebijakan :

a. Menumbuhkan dan menggugah kesadaran budaya masyarakat pada pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*)

- 2) Tipe manfaat suatu kebijakan (*Type of benefits*)
 - 3) Derajat perubahan yang hendak diraih (*Extent of Change Envision*)
 - 4) Sumber-sumberdaya yang digunakan (*Resources Committed*)
- b. Menjalankan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Hal ini dapat dilihat dari :
- 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, beserta strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)
 - 2) Karakteristik lembaga beserta rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)
 - 3) Tingkat kepatuhan, juga adanya respon dari pelaksana (*Compliance and Responsivisness*)
- c. Menumbuh-kembangkan dan menambah kesadaran masyarakat atau badan usaha pada pengurangan penggunaan kantong, wadah kemasan plastik. Hal ini dapat dilihat dari :
- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*)
 - 2) Tipe manfaat suatu kebijakan (*Type of benefits*)
 - 3) Derajat perubahan yang ingin diraih (*Extent of Change Envision*)

4) Sumber-sumberdaya yang dipergunakan (*Resources Committed*)

Implementasi Kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 dipengaruhi faktor pendukung beserta faktor penghambat pada proses pelaksanaan isi kebijakan yang melalui fenomena komunikasi, sumberdaya, dan disposisi.

Penjelasan masing-masing fenomena tersebut di bawah ini :

1. Komunikasi, merupakan penilaian implementsi kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama mengetahui informasi adanya paket kebijakan publik terkait, sehingga kedua pihak tersebut dapat menyiapkan dan melaksanakan masing-masing dengan baik.
2. Sumber Daya, merupakan Perintah dalam implementasi merupakan hal yang harus dijalankan secara cermat, jelas dan terus konsisten hal ini diharapkan agar para pelaksana implementasi berjalan efektif.
3. Disposisi, merupakan penilaian sikap pemerintah terhadap masyarakat atau pelanggar atas pelanggaran pengelolaan sampah. Pemberian sanksi diberikan agar pelanggar lebih mentaati peraturan yang ada.
4. Struktur Birokrasi, yakni pemeriksaan keteraturan dalam penugasan untuk memastikan bahwa tugas yang diberikan sesuai dengan posisi yang dipegang, dan juga untuk menilai apakah

para petugas menjalankan tugas mereka sesuai dengan yang ditetapkan.

Tabel 1.4 Fenomena Penelitian

Tujuan Penelitian	Fenomena	Gejala
Implementasi Kebijakan	Faktor Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)	1. Kepentingan Kelompok Sasaran 2. Tipe Manfaat 3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai 4. Letak Pengambilan Keputusan 5. Pelaksanaan Program 6. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan
	Faktor Lingkungan Kebijakan (<i>Context of Policy</i>)	1. Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan Strategi dari aktor yang terlibat 2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa 3. Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
	Faktor Hasil kebijakan (<i>Outcomes</i>)	1. Dampak Pada Masyarakat, Individu dan Kelompok 2. Perubahan dan Penerimaan Masyarakat
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	Komunikasi	Pola interaksi pembuat kebijakan pengelolaan sampah dengan masyarakat.
	Sumber Daya	Pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar.
	Disposisi	Pemberian sanksi kepada pelanggar kebijakan.
	Struktur Birokrasi	Keteraturan dan kesesuaian dalam pembagian tugas yang telah diberikan

Sumber: Diolah oleh penulis

1.8 Argumen Penelitian

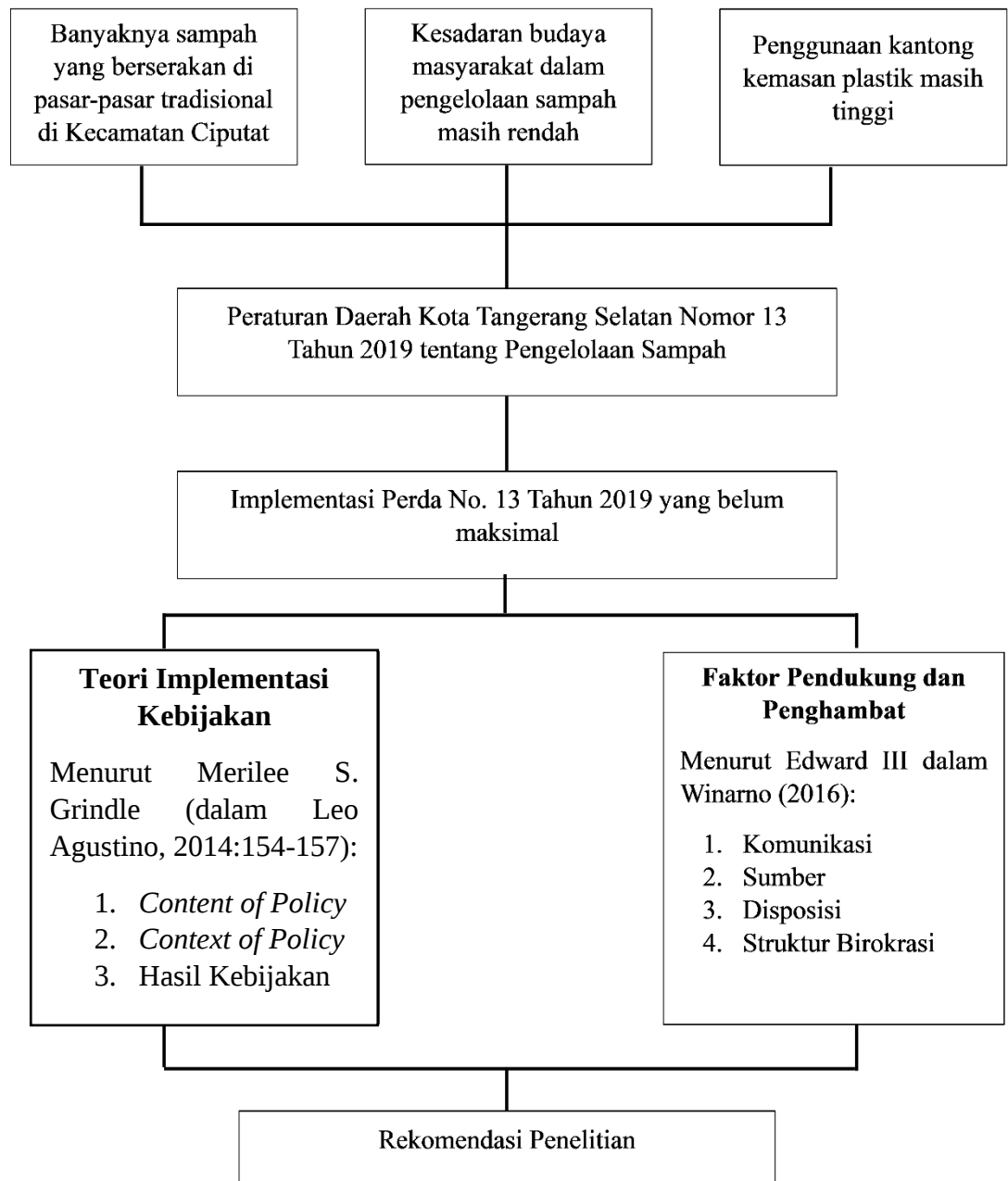
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, peneliti berfokus penelitian pada analisis implementasi kebijakan dari kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 yang dilaksanakan Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Peneliti akan menerapkan teori implementasi dari Merilee S. Grindle ketika melihat proses implementasi suatu kebijakan. Penelitian ini juga akan menggunakan teori Edward III dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi suatu kebijakan.

Peneliti melihat implementasi kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 ini masih banyak persoalan mengingat jumlah penumpukan sampah di Kecamatan Ciputat yang masih belum sesuai standar kebijakan yang dibuat. Penumpukan sampah serta kesadaran masyarakat yang masih rendah itu sangat bertolak belakang dengan Perda No.13 Tahun 2019 yang salah satunya adalah menumbuhkan dan menggugah kesadaran kultur masyarakat pada pengelolaan sampah. Masih tingginya penumpukan sampah di Pasar Tradisional Kecamatan Ciputat khususnya pada Pasar Tradisional menjadi wujud ketidaksesuaian mengenai tujuan yang ingin dicapai Perda No.13 Tahun 2019. .Penumpukan sampah di Pasar Ciputat, Pasar Cimanggis, dan Pasar Jombang yang seharusnya dikelola dengan tepat, namun pemerintah dan masyarakat serta badan usaha di Pasar Tradisional Kecamatan Ciputat belum optimal. Peneliti bertujuan untuk

menganalisis mengenai implementasi kebijakan dari Perda No.13 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari Walikota Kota Tangerang Selatan Hal ini yang menjadi pemicu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan dari Perda No.13 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

1.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.9 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Menurut (Pasolong, 2020) terdapat 3 (tiga) tipe penelitian yang mencakup penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori. Pada penelitian ini menerapkan desain penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menjelaskan hal-hal terkait apa saja yang terjadi pada saat melaksanakan penelitian, dengan menghasilkan narasi deskripsi, catatan, serta interpretasi yang terjadi.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian menentukan wilayah dimana penelitian nantinya dijalankan. Wilayah yang diambil yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan UPT TPA Cipeucang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dipilih menjadi wilayah penelitian dikarenakan adalah instansi yang bertugas dalam sektor pengelolaan sampah daerah Kota Tangerang Selatan dan juga merupakan instansi yang berwenang pada pengelolaan sampah. UPT TPA Cipeucang juga dipilih dikarenakan merupakan unit pelaksana teknis yang berwenang pada pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah di Kota Tangerang Selatan.

1.10.3 Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Berdasarkan pemaparan (Nugrahani, 2014) dengan melakukan teknik *purposive sampling* peneliti dapat menentukan informan sebagai jenis dan sumber data untuk mengumpulkan data sesuai dengan kredibilitas informan tersebut. *Accidental sampling* ialah metode pemilihan sampel yang dijalankan dengan kebetulan, di mana peneliti mengambil sampel dari siapa pun yang mereka temui tanpa perencanaan sebelumnya. (Sugiyono, 2016), Subjek pada penelitian ini yaitu

- 1) Koordinator Dinas Lingkungan Hidup,
- 2) Pegawai Kecamatan Ciputat.
- 3) Masyarakat Kecamatan Ciputat,
- 4) Pedagang pasar tradisional Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Subjek penelitian di atas menggunakan teknik *purposive sampling* menyesuaikan informan yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat mengenai Kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 serta penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* dikarenakan peneliti perlu mengumpulkan data dengan cepat atau ketika ada batasan waktu.

1.10.4 Jenis Data

Menurut (Sugiyono, 2006) jenis data dan sumber data adalah berupa kalimat yang didapat dari hasil wawancara peneliti kepada informan serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian. Penelitian ini mempergunakan jenis data kualitatif berupa narasi deskriptif, gambaran umum pada subjek dan objek penelitian, serta tindakan dan opini narasumber di lapangan dan kuantitatif berupa angka dalam gambar dan tabel.

1.10.5 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapat peneliti lewat cara melakukan observasi serta wawancara langsung terhadap informan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan selaku pelaksana pengelolaan sampah secara langsung. Informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Koordinator Dinas Lingkungan Hidup, pegawai UPT TPA Cipeucang, masyarakat dan pedagang pasar tradisional Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang dimiliki oleh suatu kelompok atau organisasi yang bukan pengolah aslinya dan dapat didapat dengan tidak langsung dari objek atau subjek penelitian yang sudah peneliti tentukan.

Pada penelitian ini peneliti mempergunakan data primer melalui wawancara kepada informan yang sudah dipilih dan menggunakan data sekunder dengan bentuk data berupa studi pustaka, dokumen regulasi, penelitian terdahulu, serta beberapa kutipan yang diambil melalui berita di internet.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2006) yakni cara atau strategi untuk mencapai data yang diinginkan oleh peneliti. Hal ini dijalankan peneliti melalui cara mengidentifikasi latar belakang lokasi penelitian, sumber penelitian, dan cara lain guna mendukung data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni:

a. Observasi

Menurut (Bungin, 2007) observasi ialah kegiatan melihat, mencium, mendengar, dan meraba suatu objek penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui gambaran peristiwa penelitian secara langsung yang digunakan untuk menjawab rumusan penelitian.

b. Wawancara

Menurut (Yunus, 2010) wawancara merupakan cara yang ditempuh peneliti dengan metode kualitatif untuk mengambil data ataupun informasi dengan melangsungkan tanya jawab kepada informan penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2006) dokumentasi adalah catatan peristiwa pada bentuk tulisan, gambar, ataupun karya dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan alat untuk melengkapi data wawancara dan observasi peneliti dengan metode kualitatif.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan hasil kajian kepustakaan yang didapat peneliti guna memfokuskan peneliti mendalami permasalahan serupa dan terdahulu.

Pada penelitian ini, peneliti menjalankan observasi dengan langsung serta melakukan dokumentasi melalui arsip Dinas Lingkungan Hidup untuk menggali lebih dalam informasi dan menjalankan wawancara dengan langsung dengan informan yang telah dipilih. Peneliti menggunakan studi pustaka melalui e-book, laporan tahunan, dan berita di media massa untuk memfokuskan peneliti dalam memahami permasalahan

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

(Sugiyono, 2012) menjelaskan bahwasanya analisis data yakni proses mencari serta menghimpun data dengan sistematis yang didapat lewat hasil wawancara beserta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui cara menyusun, mendeskripsikan, menyintesis, juga memilih

data mana yang tergolong krusial dan harus dipelajari agar memudahkan peneliti untuk menarik suatu kesimpulan. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2006) menjabarkan terdapat 3 langkah pada analisis data, yakni :

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) mengungkapkan bahwasanya mereduksi data adalah tindakan untuk merangkum suatu data menjadi bahasan-bahasan pokok saja di dalamnya dengan menitikberatkan pada hal-hal yang sekiranya penting sekaligus menemukan tema serta pola dari penelitian tersebut.

b. Penyajian Data

Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2012) menjabarkan bahwasanya ketika menyajikan sebuah data di dalam penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penggunaan teks yang sifatnya naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat menjawab masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti. Pada penelitian ini penulis akan mereduksi data-data yang sudah lampau dan tidak valid dikemudian hari, berkaca pada seringkali regulasi dalam penanganan gawat darurat yang kemungkinan berubah sesuai kondisi.

1.10.8 Kualitas Data

Menurut (Sugiyono, 2012) triangulasi merupakan suatu proses validasi data kualitatif. Proses triangulasi digunakan untuk menilai kecukupan perolehan data yang didapat oleh penulis di lapangan. Terdapat 3 (tiga) sumber pada triangulasi data diantaranya ialah triangulasi sumber data, triangulasi teknik, juga triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti mempergunakan triangulasi sumber data guna mengkaji dan menguji kredibilitas data melalui cara melakukan validasi data menggunakan berbagai sumber.